



► PROYEK INFRASTRUKTUR

BPK Periksa Spesifikasi 10 Ruas Jalan

WATES—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 10 ruas jalan di Bumi Binangun yang mendapat program perbaikan pada 2024. Pemeriksaan bertujuan mengetahui apakah proyek perbaikan jalan yang dikerjakan sesuai spesifikasi dan anggaran yang disediakan.

Ruas jalan yang diperiksa BPK antara lain Jl. Watumurah-Nogosari; Jl. Janti-Tegalsari; dan Jl. Pasar Temon-Pantai Glagah. Selain itu ada Jl. Kasatrian-Dusun Panjatan; Jl. Makam Girigondo Segmen 2 dan Segmen 3, serta Jalan Pasar Bendungan-Pleret.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Wuriandreza Gigih Muktitama, mencatat pemeriksaan jalan oleh BPK dilakukan secara *sampling* dari total proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan sepanjang 2024. Sebanyak 10 jalan yang diperiksa rata-rata memiliki anggaran perbaikan di atas Rp1 miliar.

Gigih menjelaskan sumber pendanaan proyek jalan yang diperiksa itu beragam. “Ada yang bersumber dari APBD Kulonprogo, ada yang bersumber dari dana Alokasi Khusus [DAK], dan hampir semua jalan yang diperiksa anggaran proyeknya di atas Rp1 miliar karena penentuan ruas oleh BPK juga secara *sampling*,” katanya saat ditemui, Kamis (6/3).

Dijelaskan Gigih, pemeriksaan yang dilakukan meliputi kualitas aspal yang digunakan, ketebalan material, lebar, hingga panjang jalan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan ada spesifikasi yang tidak sesuai, maka rekanan wajib mengembalikan dana kerugian dari kekurangan tersebut.

Pengembalian dana dilakukan langsung ke sumber pendanaan. “Jika sumbernya dari APBD, maka pengembalian langsung ke Pemkab, jika DAK berarti pengembalian dana ke Pemerintah Pusat. Pengembalian ini tujuannya untuk mengantisipasi kerugian negara atas proyek yang dilaksanakan,” katanya.

Pemeriksaan 10 proyek jalan ini hingga saat ini masih berlangsung di sejumlah ruas. Gigih menyebut UPT Laboratorium Peralatan dan Konstruksi DPUPKP Kulonprogo juga dilibatkan untuk membantu pemeriksaan.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pernah ditemukan proyek jalan yang hasil akhirnya tidak sesuai dengan spesifikasi. “Tapi hanya sedikit sekali kekurangannya, hanya sekitar satu sampai dua persen dari nilai proyek. Meski demikian, rekanan tetap wajib mengembalikan anggaran kekurangan,” ujarnya.

Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap. *Pertama*, dengan mengecek dokumen administrasi, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan. “Ini program tahunan BPK, sehingga menjadi hal yang biasa agar proyek pembangunan yang dikerjakan sesuai dengan spesifikasi,” katanya. (Triyo Handoko)